KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

NASKAH URGENSI

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
JABATAN DAN KELAS JABATAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI

SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN LUAR NEGERI

TAHUN 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 1
BAB I 2
URGENSI DAN TUJUAN PEMBENTUKAN 2
A. URGENSI 2
B. TUJUAN PEMBENTUKAN 2
BAB II 3
SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN 3
BAB III 4
POKOK PIKIRAN, LINGKUP, DAN OBJEK YANG AKAN DIATUR 4
A. POKOK PIKIRAN 4
B. LINGKUP 4
C. OBJEK YANG AKAN DIATUR 4
BAB IV 5
JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN 5
A. JANGKAUAN 5
B. ARAH PENGATURAN 5

BAB I
URGENSI DAN TUJUAN PEMBENTUKAN

A. URGENSI

Sehubungan dengan telah berlakunya Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Permenlu 4/2025), Kementerian Luar Negeri (Kemlu) perlu menyusun peraturan baru mengenai jabatan, kelas jabatan, dan peta jabatan agar selaras dengan struktur organisasi terbaru. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, kelas jabatan yang telah memperoleh penetapan Menteri PANRB ditetapkan dengan peraturan pimpinan kementerian/lembaga, dalam hal ini Peraturan Menteri. Sementara itu, sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, peta jabatan dapat ditetapkan oleh pimpinan kementerian/lembaga dalam bentuk Keputusan Menteri.

Menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kementerian Luar Negeri dan Permenlu 4/2025, Kemlu telah menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja, serta menyusun peta jabatan dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan. Peta jabatan tersebut telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 26/B/OT/07/2025/01 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 7/B/OT/11/2025/01 Tahun 2025. Adapun pengaturan mengenai jabatan dan kelas jabatan akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Luar Negeri.

Dengan telah ditetapkannya Permenlu 4/2025, terdapat sejumlah jabatan struktural dan jabatan fungsional baru, serta jabatan yang mengalami perubahan nomenklatur, yang kelas jabatannya belum pernah mendapatkan penetapan dari Menteri PANRB. Lebih lanjut, Kementerian PANRB telah menerbitkan persetujuan penetapan kelas jabatan di lingkungan Kemlu melalui Surat Nomor B/637/M.SM.04.00/2025 tanggal 11 November 2025, serta mengamanatkan Kemlu untuk segera menyusun Peraturan Menteri tentang Kelas Jabatan berdasarkan hasil evaluasi jabatan pada lampiran surat tersebut sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja jabatan. Surat dimaksud menetapkan kelas jabatan bagi jabatan baru maupun jabatan yang mengalami perubahan nomenklatur, sementara jabatan yang tidak berubah tetap merujuk pada penetapan Menteri PANRB sebelumnya. Dengan demikian, diperlukan penetapan Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Luar Negeri.

B. TUJUAN PEMBENTUKAN

Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Luar Negeri bertujuan untuk menyesuaikan pengaturan jabatan dan kelas jabatan sesuai dengan struktur organisasi Kemlu dalam Permenlu 4/2025, menetapkan nomenklatur jabatan dan kelas jabatan di lingkungan Kemlu, serta memberikan landasan hukum bagi jabatan baru dan jabatan yang mengalami perubahan nomenklatur sesuai dengan Permenlu 4/2025.

BAB II
SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Luar Negeri dibentuk untuk mencapai sasaran sebagai berikut:

1. Penyesuaian pengaturan mengenai jabatan dan kelas jabatan sesuai struktur organisasi baru Kementerian Luar Negeri yang tertuang dalam Permenlu 4/2025;
2. Menetapkan nomenklatur jabatan dan kelas jabatan di lingkungan Kementerian Luar Negeri meliputi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional, jabatan pelaksana, maupun jabatan lainnya, termasuk jabatan dan kelas jabatan bagi jabatan baru dan jabatan yang mengalami perubahan nomenklatur sesuai Permenlu 4/2025; dan
3. Memberikan landasan hukum bagi seluruh jabatan di lingkungan Kementerian Luar Negeri untuk bisa mendapatkan hak-hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
POKOK PIKIRAN, LINGKUP, DAN OBJEK YANG AKAN DIATUR

A. POKOK PIKIRAN

Sejalan dengan urgensi dan tujuan pembentukan, diharapkan Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Luar Negeri dapat memberikan landasan hukum bagi seluruh jabatan di lingkungan Kementerian Luar Negeri untuk bisa mendapatkan hak-hak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

B. LINGKUP

Lingkup yang akan diatur melalui Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Luar Negeri adalah penetapan nomenklatur seluruh jabatan dan kelas jabatan di lingkungan Kementerian Luar Negeri sesuai struktur organisasi yang diatur dalam Permenlu 4/2025. Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri ini akan mencabut dan menggantikan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 15 Tahun 2022 tentang Jabatan, Kelas Jabatan dan Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Luar Negeri sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 15 Tahun 2022 tentang Jabatan, Kelas Jabatan dan Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Luar Negeri.

C. OBJEK YANG AKAN DIATUR

Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri ini akan memberikan landasan hukum terhadap seluruh jabatan dan kelas jabatan di lingkungan Kementerian Luar Negeri, sebagai berikut:

1. Penetapan jabatan dan kelas jabatan untuk jabatan manajerial meliputi jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi dalam Lampiran I;
2. Penetapan jabatan dan kelas jabatan untuk jabatan non manajerial meliputi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dalam Lampiran II; dan
3. Penetapan jabatan dan kelas jabatan untuk jabatan lainnya dalam Lampiran III.

BAB IV
JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

A. JANGKAUAN

Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Luar Negeri akan menjangkau seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk ASEAN.

B. ARAH PENGATURAN

Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Luar Negeri diarahkan untuk memberikan landasan hukum atas nomenklatur jabatan dan kelas jabatan pegawai di lingkungan Kementerian Luar Negeri.